Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 3, Issue 3, October 2025, p 557-574
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23937104

Hadis dalam Pusaran Kecerdasan Buatan: Problematika Validasi, Interpretasi, dan Otoritas Keagamaan

Hadith in the Age of Artificial Intelligence: Challenges of Validation, Interpretation, and Religious Authority

Ali Sati[1]

[1]Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia.

ARTICLE INFO
Article history:
Received 28 September 2025
Revised 8 October 2025
Accepted 15 October 2025
Available online 21 October 2025

Keywords
Hadith; Artificial Intelligence; Hadith Validation; Interpretation; Religious Authority.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) has brought significant changes in the production, search, and understanding of religious knowledge, including the study of hadith. The ability of AI to access the digital corpus, present translations, summarize lectures, and answer religious questions offers convenience for the public in obtaining hadith information. However, this convenience also raises epistemological issues related to the validity of history, the accuracy of interpretation, and the legitimacy of religious authority. This study aims to analyze the problems of the use of AI in hadith studies, especially regarding the accuracy of source identification, hadith quality assessment, understanding the historical context, and the limits of AI's authority in producing religious explanations. The research uses a qualitative method based on literature studies with a critical-epistemological approach through analysis of the hadith science literature, the methodology of sanad and matan criticism, and contemporary studies on artificial intelligence. The results of the study show that AI can function as an auxiliary instrument in the search and processing of hadith information, but it cannot be positioned as an independent authority in determining the validity of the history or determining the meaning of the hadith. The limitations of source verification, the potential for information hallucinations, simplification of context, and reliance on training data require the involvement of hadith experts in the validation and interpretation process.

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menghadirkan perubahan signifikan dalam produksi, pencarian, dan pemahaman pengetahuan keagamaan, termasuk kajian hadis. Kemampuan AI dalam mengakses korpus digital, menyajikan terjemahan, merangkum syarah, serta menjawab pertanyaan keagamaan menawarkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hadis. Namun, kemudahan tersebut sekaligus memunculkan persoalan epistemologis terkait validitas riwayat, ketepatan interpretasi, dan legitimasi otoritas keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penggunaan AI dalam kajian hadis, khususnya menyangkut keakuratan identifikasi sumber, penilaian kualitas hadis, pemahaman konteks historis, serta batas kewenangan AI dalam menghasilkan penjelasan keagamaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan kritis-epistemologis melalui analisis terhadap literatur ilmu hadis, metodologi kritik sanad dan matan, serta kajian kontemporer mengenai kecerdasan buatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI dapat berfungsi sebagai instrumen bantu dalam penelusuran dan pengolahan informasi hadis, tetapi belum dapat diposisikan sebagai otoritas mandiri dalam menentukan kesahihan riwayat maupun menetapkan makna hadis. Keterbatasan verifikasi sumber, potensi halusinasi informasi, penyederhanaan konteks, dan ketergantungan pada data pelatihan menuntut keterlibatan ahli hadis dalam proses validasi dan interpretasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memperoleh, mengolah, memproduksi, dan menyebarluaskan pengetahuan. Teknologi yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk otomatisasi pekerjaan teknis, kini berkembang menjadi sistem yang mampu memproses bahasa alami, merangkum

*Corresponding Author
e-mail: alisati@uinsyahada.ac.id

dokumen, menerjemahkan teks, mengidentifikasi pola informasi, bahkan menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang bersifat akademik dan keagamaan. Perubahan ini menghadirkan peluang sekaligus persoalan epistemologis baru, terutama ketika kecerdasan buatan mulai digunakan sebagai sarana untuk mengakses dan memahami sumber-sumber ajaran Islam, termasuk hadis Nabi Muhammad saw.(Zaenudin & Riyan, 2024)

Dalam konteks Indonesia, perluasan ruang digital menyediakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat mengakses pengetahuan keagamaan melalui berbagai platform. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 mencatat bahwa penetrasi internet Indonesia mencapai 80,66 persen, dengan jumlah penduduk yang terkoneksi internet sebanyak 229.428.417 jiwa dari total populasi 284.438.900 jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 79,50 persen. Data ini memperlihatkan besarnya ruang digital dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun angka penetrasi internet tidak secara langsung menunjukkan jumlah pengguna AI untuk kepentingan keagamaan, perkembangan tersebut dapat dibaca sebagai kondisi sosial-teknologis yang memperluas peluang masyarakat untuk menggunakan teknologi digital, termasuk aplikasi kecerdasan buatan, dalam memperoleh informasi keislaman. Dengan demikian, perubahan teknologi bukan hanya menyangkut cara memperoleh informasi, melainkan juga berpotensi mengubah pola hubungan masyarakat dengan sumber pengetahuan dan otoritas keagamaan.(Afandi & Kurnia, 2023)

Kehadiran AI dalam studi hadis dapat dilihat melalui sejumlah fungsi, antara lain membantu penelusuran redaksi hadis, pencarian sumber riwayat, penerjemahan teks Arab, peringkasan kitab syarah, pengelompokan tema hadis, serta penyusunan penjelasan awal terhadap suatu persoalan keagamaan. Fungsi-fungsi tersebut memiliki nilai praktis karena khazanah hadis tersebar dalam berbagai kitab, versi digital, basis data, dan literatur penjelasan yang tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat umum. Teknologi pemrosesan bahasa alami juga memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dengan bahasa sehari-hari, kemudian memperoleh jawaban dalam bentuk uraian yang relatif sistematis. Dalam batas tertentu, kemampuan ini dapat mendukung pembelajaran hadis dan memperluas akses terhadap literatur keislaman.(Siregar, 2025)

Namun, kemudahan tersebut tidak serta-merta menjamin kebenaran informasi yang dihasilkan. Sistem AI generatif bekerja dengan memproses pola data dan menghasilkan respons berdasarkan model komputasional. Oleh karena itu, jawaban yang tampak meyakinkan secara bahasa belum tentu memiliki ketepatan sumber, kesahihan atribusi, atau validitas metodologis. AI dapat menghasilkan rujukan kitab yang tidak tepat, mencampurkan beberapa redaksi riwayat, menyederhanakan perbedaan pendapat ulama, bahkan menyampaikan informasi yang tidak memiliki dasar sumber yang dapat diverifikasi. Persoalan ini menjadi serius ketika jawaban AI diperlakukan sebagai penjelasan final mengenai sabda Nabi, padahal informasi hadis menuntut ketelitian dalam aspek sumber, sanad, matan, kualitas periwayatan, dan konteks pemaknaan(Eric Bax, Melissa Gerber, Lisa Giaffo, Arundhyoti Sarkar, Nikki Thompson, 2023)

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan karakteristik epistemologi ilmu hadis. Validitas suatu hadis tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kemiripan redaksi atau keberadaan teks dalam ruang digital. Penilaian hadis memerlukan proses *takhrij* untuk menelusuri sumber riwayat, pemeriksaan kesinambungan sanad, penelitian integritas dan kapasitas intelektual para perawi melalui ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, serta analisis terhadap kemungkinan adanya *'illah* dan kejanggalan (*syudzudz*). Pada sisi matan, penelitian juga perlu memperhatikan kesesuaian redaksi, perbandingan jalur periwayatan, hubungan dengan riwayat lain, serta prinsip-prinsip pemahaman hadis. Dengan demikian, proses validasi hadis merupakan kegiatan ilmiah yang melibatkan seperangkat metode, disiplin keilmuan, dan pertimbangan kritis

yang tidak dapat direduksi menjadi pencarian teks secara otomatis(Muhammad Taufiqul Hidayat et al., 2025).

Selain persoalan validasi, penggunaan AI juga menghadirkan problem interpretasi. Hadis tidak selalu dapat dipahami secara tepat melalui pembacaan tekstual yang terpisah dari konteks historis, sosial, dan kebahasaan. Pemahaman terhadap hadis dapat memerlukan pengetahuan mengenai *asbab wurud al-hadits*, hubungan ant riwayat, konsep *mukhtalif al-hadits*, kaidah kebahasaan Arab, tujuan pensyariatan, serta penjelasan para ulama dalam literatur syarah. Sebuah hadis yang disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan tertentu, misalnya, tidak selalu dapat dipindahkan secara langsung menjadi ketentuan umum tanpa mempertimbangkan situasi yang melatarbelakanginya. Apabila AI hanya mengandalkan pola tekstual dan hubungan statistik ant kata, terdapat risiko penyederhanaan makna, penghilangan konteks, dan pengabaian keragaman interpretasi dalam tradisi keilmuan Islam.(Nadhiran, 2017)

Masalah berikutnya adalah otoritas keagamaan. Dalam tradisi keilmuan hadis, otoritas tidak lahir semata-mata dari kemampuan menyampaikan informasi, melainkan dibangun melalui penguasaan metodologi, pengakuan keilmuan, integritas akademik, kesinambungan tradisi pembelajaran, serta pertanggungjawaban terhadap pendapat yang dikemukakan. AI dapat menghasilkan penjelasan yang menyerupai bahasa seorang ahli hadis, tetapi kemiripan gaya bahasa tersebut tidak menjadikannya memiliki kompetensi keilmuan dan tanggung jawab moral sebagaimana seorang muhaddis. Di sinilah muncul persoalan penting: ketika masyarakat memperoleh jawaban keagamaan secara cepat melalui AI, apakah teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai instrumen bantu, atau mulai ditempatkan sebagai sumber otoritas yang menentukan benar dan salahnya suatu informasi hadis?(Mala, 2015)

Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan membedakan antara otoritas informasional dan otoritas epistemik. Otoritas informasional berkaitan dengan kemampuan menyediakan, mengorganisasi, dan menyajikan informasi. Sementara itu, otoritas epistemik berkaitan dengan kapasitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menetapkan validitas pengetahuan berdasarkan metode dan kompetensi tertentu. AI mungkin memiliki kemampuan informasional yang tinggi, tetapi kemampuan tersebut tidak otomatis memberinya legitimasi epistemik untuk menetapkan derajat kesahihan hadis atau menentukan makna final suatu riwayat. Pembedaan ini penting agar pemanfaatan teknologi tidak menggeser posisi metodologi ilmu hadis dan otoritas keilmuan ulama.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pemanfaatan kecerdasan buatan perlu ditempatkan dalam prinsip tanggung jawab, transparansi, keamanan informasi, dan pelindungan hak masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi relevan ketika penggunaan aplikasi AI melibatkan pemrosesan data pribadi pengguna. Secara lebih khusus, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial memuat prinsip inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, pelindungan data pribadi, serta penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tidak cukup dinilai berdasarkan efisiensi teknis, tetapi juga harus memperhatikan keandalan informasi dan dampaknya terhadap masyarakat (Muh Farid Wadjedy, 2025).

Meskipun demikian, regulasi teknologi tersebut tidak secara khusus mengatur metode penilaian kesahihan hadis ataupun menetapkan AI sebagai otoritas keagamaan. Oleh sebab itu, dasar hukum positif berfungsi sebagai kerangka etis dan tata kelola pemanfaatan teknologi,

sedangkan standar validasi dan interpretasi hadis tetap harus merujuk pada disiplin ilmu hadis. Pembedaan ini penting agar tidak terjadi pencampuradukan antara legalitas penggunaan teknologi dan legitimasi keilmuan atas informasi keagamaan yang dihasilkannya.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian mengenai hadis dalam pusaran kecerdasan buatan menjadi penting karena mempertemukan dua ranah yang memiliki karakter epistemologis berbeda: teknologi komputasional yang bekerja melalui pemrosesan data dan tradisi ilmu hadis yang dibangun melalui transmisi riwayat, kritik sanad dan matan, serta penalaran keilmuan. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menolak penggunaan AI dalam studi hadis, tetapi untuk menguji batas kemampuan, risiko, dan kedudukan teknologi tersebut dalam proses produksi pengetahuan keagamaan. Dengan pendekatan kritis-epistemologis, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama: pertama, bagaimana kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan dalam proses penelusuran dan validasi hadis serta apa keterbatasannya; kedua, bagaimana risiko kesalahan interpretasi muncul ketika AI menjelaskan hadis tanpa mempertimbangkan perangkat metodologis ilmu hadis secara memadai; dan ketiga, bagaimana kedudukan AI dalam konstruksi otoritas keagamaan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kritis-epistemologis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam kedudukan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam proses validasi, interpretasi, dan pembentukan otoritas pengetahuan hadis. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur kemampuan teknis AI secara kuantitatif, melainkan menganalisis kesesuaian penggunaan teknologi tersebut dengan prinsip-prinsip metodologis dalam disiplin ilmu hadis (Septiana & Khoiriyah, 2024).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi literatur utama ilmu hadis, khususnya kitab-kitab *musthalah al-hadits*, *takhrij al-hadits*, *al-jarh wa al-ta'dil*, kritik sanad dan matan, serta kitab-kitab syarah hadis. Literatur tersebut digunakan untuk menetapkan parameter epistemologis dalam menilai informasi hadis yang dihasilkan AI. Data sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian tentang kecerdasan buatan generatif, epistemologi digital, otoritas keagamaan, serta regulasi Indonesia yang berkaitan dengan informasi elektronik, pelindungan data pribadi, dan etika kecerdasan artifisial(Nurrisa & Hermina, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dari basis data akademik yang dapat diakses. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada empat dimensi, yaitu keterlacakan sumber hadis, ketepatan validasi sanad dan matan, ketepatan interpretasi kontekstual, serta legitimasi otoritas keagamaan. Selanjutnya, temuan konseptual dianalisis secara komparatif dengan kaidah-kaidah ilmu hadis untuk mengidentifikasi kesesuaian, keterbatasan, dan potensi risiko penggunaan AI. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari literatur klasik, kajian akademik kontemporer, dan dokumen regulasi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan model otoritas hadis berbantuan AI yang menempatkan teknologi sebagai instrumen pendukung, sementara validasi dan pertanggungjawaban keilmuan tetap berada pada kompetensi ahli hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Validasi Hadis di Era Kecerdasan Buatan: Antara Kemudahan Takhrij dan Problem Akurasi Sanad-Matan

Transformasi teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah membuka babak baru dalam perkembangan studi hadis, khususnya pada aktivitas penelusuran sumber riwayat, identifikasi perawi, pengelompokan redaksi, dan pemeriksaan awal terhadap kualitas hadis. Jika dalam tradisi klasik proses *takhrij al-hadits* menuntut penguasaan literatur hadis, kemampuan menelusuri berbagai jalur periwayatan, serta kecermatan membandingkan pendapat ulama, teknologi AI menawarkan mekanisme pencarian yang lebih cepat melalui pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), pencocokan teks (*text matching*), dan pengolahan basis data digital. Perubahan ini bukan sekadar pergantian perangkat pencarian, melainkan pergeseran cara pengetahuan hadis diakses dan diproses. Hadis yang sebelumnya harus ditelusuri melalui indeks, kitab induk, dan literatur rijal, kini dapat dicari melalui instruksi bahasa sehari-hari. Meskipun demikian, efisiensi pencarian tidak identik dengan validitas hasil, sebab persoalan mendasar dalam ilmu hadis bukan hanya menemukan suatu riwayat, melainkan memastikan asal-usul, kesinambungan transmisi, integritas perawi, dan ketepatan matannya.(Agustina & Suharya, 2024)

Secara epistemologis, perlu dibedakan tiga tingkatan aktivitas yang sering kali tercampur dalam penggunaan AI, yaitu *hadith retrieval*, *hadith identification*, dan *hadith authentication*. *Hadith retrieval* merupakan proses menemukan teks atau informasi hadis berdasarkan kata kunci tertentu. *Hadith identification* berkaitan dengan pengenalan redaksi, sumber kitab, nama sahabat perawi, atau variasi jalur periwayatan. Adapun *hadith authentication* merupakan proses penilaian kritis terhadap kualitas hadis berdasarkan keseluruhan perangkat ilmu hadis. Dua aktivitas pertama relatif dapat dibantu oleh sistem komputasional karena memiliki unsur pencocokan teks, pengenalan entitas, dan pengelompokan informasi. Akan tetapi, aktivitas ketiga memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena melibatkan penalaran historis, evaluasi kredibilitas perawi, perbandingan jalur transmisi, dan identifikasi cacat tersembunyi. Dengan demikian, keberhasilan AI menemukan hadis tidak dapat dijadikan bukti bahwa AI telah berhasil mengautentikasi hadis tersebut.(Martinelli et al., 2023)

Dalam tradisi ilmu hadis, penilaian kesahihan tidak ditentukan berdasarkan popularitas suatu redaksi, frekuensi kemunculannya dalam ruang digital, atau kesesuaian maknanya dengan ajaran Islam secara umum. Hadis sahih memiliki sejumlah persyaratan yang saling berkaitan, yakni kesinambungan sanad (*ittishal al-sanad*), keadilan perawi (*'adalah al-ruwah*), ketelitian perawi (*dhabth*), tidak mengandung kejanggalan (*'adam al-syudzudz*), dan terbebas dari cacat tersembunyi (*'adam al-'illah*). Kelima kriteria tersebut menunjukkan bahwa kesahihan hadis merupakan hasil pengujian yang bersifat kumulatif dan saling mengonfirmasi. Sebuah riwayat tidak dapat dinyatakan sahih hanya karena nama kitab sumbernya berhasil ditemukan. Identifikasi sumber merupakan tahap awal, sedangkan penetapan kualitas membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap struktur transmisi dan substansi riwayat.(Rustiyana et al., 2025)

Pada aspek penelusuran sumber, AI memiliki potensi yang cukup signifikan. Sistem berbasis pemrosesan bahasa alami dapat membantu mengenali redaksi hadis meskipun pengguna tidak mengetahui nama kitab, nomor hadis, atau nama perawi. Teknologi pencarian semantik bahkan memungkinkan pencarian berdasarkan kemiripan makna, bukan hanya kesamaan kata secara literal. Kemampuan tersebut bermanfaat ketika suatu hadis beredar dalam bentuk terjemahan, potongan kutipan, atau redaksi yang telah mengalami perubahan akibat proses penyebaran digital. AI juga dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan sumber hadis dalam kitab-kitab primer, menyusun daftar variasi redaksi, serta mengarahkan peneliti kepada literatur yang relevan. Akan tetapi, hasil pencarian tersebut tetap harus diperiksa pada sumber aslinya. Kemiripan semantik tidak selalu menunjukkan bahwa dua teks berasal dari hadis yang

sama, sedangkan kesamaan sebagian redaksi belum tentu membuktikan kesamaan sanad maupun konteks periwayatan.

Problem berikutnya terletak pada ketepatan atribusi sumber. Dalam penelitian hadis, penyebutan nama kitab, nomor hadis, dan nama sahabat merupakan informasi bibliografis yang harus dapat diverifikasi. AI generatif berpotensi menghasilkan rujukan yang tampak lengkap dan meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai dengan edisi kitab atau sumber primer yang sebenarnya. Kesalahan ini dapat terjadi ketika sistem menggabungkan informasi dari berbagai dokumen, mencampurkan redaksi yang serupa, atau menghasilkan jawaban berdasarkan pola bahasa yang dipelajarinya tanpa penelusuran langsung terhadap sumber yang dimaksud. Karena itu, jawaban AI yang menyebutkan bahwa suatu hadis terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, atau kitab sunan tertentu belum dapat diterima sebagai bukti sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap teks dan lokasi riwayat dalam kitab tersebut. Dalam konteks ini, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah AI mampu memberikan jawaban, melainkan apakah jawaban itu memiliki jejak sumber yang dapat ditelusuri (*source traceability*).

Temuan penelitian Yeni Amalia (2024) memberikan gambaran empiris mengenai persoalan tersebut. Penelitian yang membandingkan analisis ChatGPT terhadap lima hadis dengan rujukan *Jawami'ul Kalim* menemukan bahwa ChatGPT mampu memberikan analisis awal mengenai validitas sanad dan matan, tetapi uraian yang dihasilkan cenderung deskriptif dan belum mencapai kedalaman penelusuran yang tersedia dalam perangkat rujukan hadis tersebut. Penelitian itu juga mencatat ketidakkonsistenan pemahaman ChatGPT terhadap konsep *'ulum al-hadits*, termasuk jawaban yang keliru atau tidak disertai rujukan yang dapat diverifikasi. Temuan ini penting, tetapi harus dibaca secara proporsional: lima hadis yang dijadikan sampel tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh model AI selalu gagal melakukan analisis hadis. Nilai akademiknya justru terletak pada pembuktian bahwa jawaban AI memerlukan pengujian terhadap sumber dan metode yang memiliki otoritas dalam tradisi ilmu hadis.

Kajian Muhammad Ghifari (2025) mengenai validitas data hadis dalam praktik *takhrij* menggunakan ChatGPT memperkuat persoalan tersebut. Penelitian itu menemukan bahwa ChatGPT dapat menyebutkan kitab sumber, menampilkan teks Arab, dan memberikan penilaian awal seperti *sahih* atau *hasan*. Namun, konsistensi analisis sanad belum memenuhi tuntutan *takhrij* klasik. Secara khusus, sistem belum secara memadai menelusuri seluruh jalur periwayatan, mengevaluasi kredibilitas para perawi, serta mendeteksi *syudzudz* dan *'illah*. Dengan demikian, kemampuan menghasilkan label kualitas hadis tidak boleh disamakan dengan kemampuan membuktikan kualitas tersebut. Penetapan derajat hadis membutuhkan argumentasi yang menjelaskan dasar penilaian, bukan sekadar kesimpulan kategoris yang dihasilkan oleh sistem.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika analisis diarahkan pada kesinambungan sanad. Sanad bukan sekadar rangkaian nama yang dapat disusun dalam bentuk daftar, melainkan struktur transmisi historis yang harus diuji kemungkinan pertemuan dan penerimaan riwayat antarp erawi. Pemeriksaan kesinambungan sanad menuntut perhatian terhadap tahun kelahiran dan wafat perawi, tempat tinggal, perjalanan ilmiah, hubungan guru-murid, serta kemungkinan terjadinya pertemuan atau proses periwayatan. AI dapat membantu mengorganisasi data biografis dan membangun hubungan antarnama perawi dalam bentuk jaringan (*narrator network*). Akan tetapi, relasi yang terbentuk secara komputasional belum tentu membuktikan bahwa seorang perawi benar-benar menerima hadis dari perawi sebelumnya. Kedekatan generasi, kesamaan wilayah, atau keberadaan dua nama dalam satu jaringan tidak otomatis membuktikan hubungan *sama'* dan *tahammul wa al-ada'*. Di sinilah terlihat perbedaan antara hubungan data dan hubungan periwayatan: yang pertama dapat dipetakan melalui komputasi,

sedangkan yang kedua membutuhkan pembuktian berdasarkan sumber historis dan penilaian kritis ahli hadis.

Dimensi *'adalah* dan *dhabth* juga memperlihatkan keterbatasan pendekatan komputasional. Penilaian terhadap integritas dan ketelitian perawi tidak cukup dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan nama atau mengumpulkan komentar biografis secara otomatis. Literatur *al-jarh wa al-ta'dil* memuat penilaian ulama yang terkadang berbeda, bahkan menggunakan istilah kritik dengan tingkat kekuatan yang tidak selalu sama. Seorang perawi dapat dinilai *tsiqah* oleh seorang kritikus, tetapi memperoleh catatan tertentu dari kritikus lainnya karena perbedaan periode, kualitas hafalan, atau keadaan periwayatannya. Bahkan, penilaian terhadap seorang perawi dapat berubah apabila dikaitkan dengan riwayat tertentu, guru tertentu, atau fase tertentu dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, AI tidak cukup hanya mengumpulkan label penilaian perawi, tetapi harus mampu menampilkan sumber penilaian, konteks kritik, dan perbedaan pandangan ulama. Tanpa mekanisme tersebut, teknologi berisiko mengubah tradisi kritik yang argumentatif menjadi klasifikasi data yang terlalu sederhana.

Keterbatasan yang lebih mendasar muncul dalam pemeriksaan *'illah* dan *syudzudz*. Kedua aspek ini merupakan bagian penting dari kritik hadis yang menuntut kemampuan membandingkan berbagai jalur periwayatan secara mendalam. Suatu riwayat dapat memiliki sanad yang secara lahiriah tampak bersambung dan para perawinya dikenal terpercaya, tetapi tetap mengandung cacat tersembunyi yang hanya dapat diketahui melalui perbandingan dengan jalur lain yang lebih kuat. Demikian pula, *syudzudz* tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat apakah suatu redaksi berbeda dari redaksi lain. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan mengenai posisi perawi, kekuatan hafalan, jumlah dan kualitas jalur pendukung, serta bentuk pertentangan yang terjadi. Dalam keadaan demikian, kesamaan teks bukan jaminan kesahihan, sedangkan perbedaan teks tidak selalu menunjukkan kelemahan. AI dapat membantu mendeteksi perbedaan redaksi dan mengelompokkan variasi riwayat, tetapi keputusan apakah perbedaan tersebut merupakan *'illah*, *syudzudz*, *idraj*, *qalb*, atau bentuk variasi periwayatan lainnya tetap membutuhkan analisis ahli.

Perkembangan penelitian komputasional menunjukkan bahwa hubungan antara AI dan autentikasi hadis sebenarnya tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Kajian sistematis Alit dan kolega (2025), yang menyintesis 41 penelitian primer melalui pendekatan *systematic literature review* berbasis PRISMA, mengidentifikasi empat bidang utama pemanfaatan AI dalam studi hadis: autentikasi dan verifikasi, pemrosesan teks dan klasifikasi, pengembangan korpus serta basis data, dan pendidikan serta literasi hadis. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa AI menawarkan peningkatan efisiensi, skalabilitas, dan aksesibilitas, tetapi masih menghadapi risiko fabrikasi, kesalahan interpretasi, bias, serta pergeseran otoritas keilmuan. Angka 41 penelitian tersebut merupakan jumlah studi yang disertakan dalam tinjauan sistematis, bukan jumlah hadis yang telah berhasil diautentikasi oleh AI. Pembedaan ini penting agar data penelitian tidak ditafsirkan secara berlebihan.

Sementara itu, penelitian perbandingan ChatGPT dan Gemini oleh Alit dan Aris (2025) menguji empat aspek pekerjaan *takhrij*, yaitu prinsip dasar takhrij, teknik pencarian sumber hadis, analisis pohon sanad, dan pelaporan hasil takhrij. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua platform memiliki keunggulan yang berbeda: ChatGPT dinilai lebih menonjol dalam ketelitian ilmiah dan pemahaman epistemologis, sedangkan Gemini memperlihatkan keunggulan dalam penyajian yang sistematis dan kemudahan penggunaan. Meskipun demikian, penelitian tersebut tetap menekankan perlunya pemeriksaan silang terhadap sumber asli dan konsultasi dengan pihak yang memiliki otoritas keilmuan. Temuan ini menggeser diskusi dari pertanyaan apakah AI

mampu melakukan *takhrij* menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu sejauh mana hasil kerja AI dapat diuji, direproduksi, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan standar ilmu hadis.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa problem utama AI dalam validasi hadis bukan semata-mata keterbatasan kapasitas komputasi, melainkan ketidaksamaan antara logika pemrosesan data dan logika pembuktian dalam ilmu hadis. Sistem AI generatif pada dasarnya menghasilkan respons berdasarkan pola yang dipelajari dari data, sedangkan kritik hadis menuntut pembuktian yang dapat dilacak kepada sumber transmisi dan argumentasi para ahli. Oleh karena itu, jawaban yang lancar, sistematis, dan menggunakan terminologi ilmu hadis belum tentu menunjukkan adanya proses verifikasi yang benar. Dalam disiplin hadis, kesimpulan harus mengikuti bukti; sebaliknya, dalam keluaran AI generatif, kesimpulan dapat tampil meyakinkan meskipun landasan pembuktiannya tidak tersedia atau tidak tepat. Ketegangan inilah yang menjadi problem epistemologis utama dalam penggunaan AI untuk autentikasi hadis.

Atas dasar itu, pemanfaatan AI dalam *takhrij* seharusnya ditempatkan dalam kerangka kerja bertingkat. Tahap pertama adalah identifikasi redaksi dan pencarian sumber, yaitu AI membantu menemukan kemungkinan lokasi hadis dalam literatur primer. Tahap kedua adalah pemetaan jalur periwayatan, yakni sistem menyusun data perawi dan hubungan sanad berdasarkan sumber yang dapat ditelusuri. Tahap ketiga adalah verifikasi kritis, yang meliputi pemeriksaan kesinambungan sanad, penilaian *'adalah* dan *dhabth*, serta perbandingan pendapat ulama *jarh wa ta'dil*. Tahap keempat adalah kritik komparatif terhadap matan dan jalur periwayatan untuk menguji kemungkinan *syudzudz* dan *'illah*. Tahap kelima adalah penetapan kesimpulan yang disertai argumentasi dan rujukan primer. Pada tahap terakhir inilah otoritas keilmuan ahli hadis menjadi sangat menentukan, sebab sistem harus dapat menjelaskan dasar suatu penilaian dan membuka ruang koreksi apabila ditemukan bukti yang berbeda.

Dengan demikian, transformasi validasi hadis di era kecerdasan buatan tidak seharusnya dipahami sebagai penggantian metodologi klasik oleh teknologi baru. Yang lebih tepat adalah rekonstruksi hubungan antara perangkat komputasional dan tradisi kritik hadis. AI dapat mempercepat pencarian, mengurangi beban kerja administratif, membantu pemetaan jaringan perawi, serta mengidentifikasi variasi redaksi dalam skala besar. Namun, teknologi tersebut tidak boleh diberi kewenangan epistemik secara otomatis untuk menetapkan kesahihan hadis tanpa pembuktian sanad dan matan yang dapat diverifikasi. Prinsip yang perlu dipertahankan ialah bahwa AI berfungsi sebagai *instrument of verification*, bukan *authority of authentication*. Dengan prinsip ini, inovasi teknologi dapat memperkuat produktivitas penelitian hadis tanpa mengorbankan ketelitian metodologis, integritas sumber, dan otoritas keilmuan yang menjadi fondasi tradisi hadis.(Hidayah & Musaddad, 2025)

Problematika Interpretasi Hadis oleh Kecerdasan Buatan: Antara Analisis Tekstual dan Kehilangan Konteks Keilmuan

Idealnya, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah memperluas kemungkinan interpretasi hadis melalui kemampuan menerjemahkan teks Arab, merangkum kitab syarah, menjelaskan kandungan suatu riwayat, dan menghubungkan hadis dengan persoalan kontemporer. Melalui teknologi pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai makna hadis dalam bahasa Indonesia, kemudian memperoleh jawaban dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Kemampuan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki penguasaan bahasa Arab atau akses memadai terhadap literatur hadis klasik. Dalam konteks pendidikan Islam, AI bahkan berpotensi menjadi sarana pembelajaran awal untuk mengenalkan kandungan hadis, terminologi keilmuan, dan berbagai penjelasan ulama. Namun, kemudahan menghasilkan penjelasan tidak serta-merta menunjukkan bahwa sistem telah memahami hadis sebagaimana

hadis dipahami dalam tradisi keilmuan Islam. Persoalan mendasarnya terletak pada perbedaan antara pemrosesan bahasa dan pemahaman keilmuan: AI dapat mengolah hubungan antarkata dan menghasilkan uraian yang koheren, tetapi pemahaman hadis menuntut kemampuan menempatkan teks dalam jaringan kebahasaan, historis, periwayatan, dan interpretasi yang saling berkaitan.(Adelia et al., 2025)

Problem pertama muncul pada aspek kebahasaan Arab. Hadis sebagai teks berbahasa Arab memiliki karakteristik linguistik yang tidak selalu dapat dipindahkan secara langsung ke dalam bahasa lain. Struktur gramatikal, relasi sintaksis, makna leksikal, gaya bahasa, penggunaan majas, serta konteks komunikasi berpengaruh terhadap penentuan makna. Satu kata dapat memiliki beberapa kemungkinan arti, sedangkan perubahan struktur kalimat dapat menghasilkan konsekuensi pemaknaan yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, pemahaman terhadap sebuah hadis juga membutuhkan perhatian terhadap perbedaan penggunaan kata dalam bahasa Arab klasik dan bahasa Arab kontemporer. Oleh karena itu, penerjemahan hadis bukan sekadar proses mengganti kosakata bahasa sumber dengan padanan bahasa sasaran, melainkan kegiatan interpretatif yang menuntut ketepatan memahami maksud dan struktur tuturan.(Windariyah & Masruri, 2025)

AI generatif dapat menghasilkan terjemahan yang lancar dan secara gramatikal tampak meyakinkan. Akan tetapi, kelancaran bahasa tidak selalu menjamin ketepatan makna. Sistem dapat memilih arti yang paling umum berdasarkan pola penggunaan bahasa, padahal konteks hadis menghendaki makna yang lebih khusus. Kesalahan semacam ini dapat terjadi ketika suatu kata dipahami secara leksikal tanpa mempertimbangkan relasi sintaksis, konteks kalimat, atau penggunaan istilah dalam tradisi hadis. Bahkan, terjemahan yang secara individual tampak benar dapat menghasilkan pemahaman yang keliru apabila hubungan antarkalimat dan maksud keseluruhan riwayat tidak diperhatikan. Dengan demikian, persoalan interpretasi AI bukan hanya terletak pada kemungkinan kesalahan menerjemahkan kata, tetapi juga pada kecenderungan menghasilkan makna yang terlihat utuh dari unsur-unsur bahasa yang sebenarnya belum dianalisis secara memadai.

Dalam kajian hadis, persoalan kebahasaan tersebut berkaitan erat dengan prinsip memahami teks berdasarkan keseluruhan konteksnya. Penjelasan hadis tidak dapat dilepaskan dari struktur redaksi, variasi periwayatan, dan penggunaan bahasa Nabi. Perbedaan satu kata dalam beberapa jalur riwayat dapat berpengaruh terhadap penentuan makna, cakupan hukum, dan implikasi normatif suatu hadis. Karena itu, analisis terhadap matan memerlukan pembandingan redaksi dan perhatian terhadap kemungkinan adanya periwayatan secara makna (*riwayah bi al-ma'na*). AI dapat membantu mengidentifikasi variasi redaksi, tetapi belum tentu mampu menentukan signifikansi perbedaan tersebut tanpa dukungan metodologi kritik matan dan literatur penjelasan hadis. Kemampuan menyajikan terjemahan, dengan demikian, harus dibedakan dari kemampuan melakukan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.(Pratama, 2025)

Problem kedua berkaitan dengan pengabaian *asbab wurud al-hadits*. Sebuah hadis tidak selalu disampaikan dalam ruang komunikasi yang kosong. Sebagian riwayat muncul sebagai jawaban terhadap pertanyaan, respons terhadap peristiwa tertentu, penjelasan atas persoalan sosial, atau petunjuk Nabi dalam situasi historis tertentu. Pengetahuan mengenai latar belakang kemunculan hadis membantu menjelaskan kepada siapa suatu pernyataan ditujukan, persoalan apa yang sedang dihadapi, serta bagaimana cakupan makna dan penerapannya harus dipahami. Tanpa mempertimbangkan konteks tersebut, suatu hadis berpotensi dipahami secara terlepas dari situasi yang melatarbelakanginya. Akibatnya, pernyataan yang pada mulanya bersifat khusus

dapat digeneralisasi secara tidak tepat, atau petunjuk yang memiliki dimensi kontekstual diperlakukan sebagai ketentuan yang berlaku tanpa mempertimbangkan keadaan yang berbeda.

Keterbatasan AI pada aspek ini muncul karena konteks historis hadis tidak selalu tersaji secara eksplisit dalam teks matan. Informasi mengenai latar belakang riwayat sering kali harus ditelusuri melalui berbagai sumber, seperti kitab-kitab *asbab wurud al-hadits*, kitab syarah, literatur sejarah, dan jalur periwayatan lain. Sistem AI yang hanya memproses satu kutipan hadis tanpa menelusuri sumber pendukung berisiko menghasilkan penjelasan yang terlepas dari latar historisnya. Bahkan ketika AI mampu menyebutkan suatu peristiwa sebagai sebab kemunculan hadis, informasi tersebut tetap harus diverifikasi karena kemungkinan pencampuran antara beberapa riwayat atau penjelasan ulama tetap terbuka. Oleh sebab itu, konteks historis tidak dapat diperlakukan sebagai tambahan informasi yang bersifat dekoratif, melainkan sebagai salah satu perangkat penting dalam menentukan arah interpretasi.

Persoalan tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan perbedaan antara makna tekstual dan cakupan penerapan hadis. Tidak setiap hadis yang menggunakan bentuk pernyataan umum harus dipahami sebagai ketentuan tanpa batas. Sebaliknya, tidak setiap riwayat yang muncul dalam peristiwa khusus otomatis terbatas pada peristiwa tersebut. Penentuan apakah suatu hadis berlaku secara umum atau khusus memerlukan analisis terhadap redaksi, konteks, dalil pendukung, dan penjelasan ulama. Dalam hal ini, AI dapat menghasilkan generalisasi berdasarkan struktur kalimat, tetapi generalisasi linguistik tidak selalu identik dengan generalisasi hukum atau makna keagamaan. Interpretasi yang tepat memerlukan pertimbangan metodologis yang melampaui pola bahasa.

Problem ketiga berkaitan dengan kajian *mukhtalif al-hadits*, yakni upaya memahami dan mengompromikan hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan. Dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan antarriwayat tidak serta-merta menunjukkan kontradiksi substantif. Perbedaan tersebut dapat muncul karena variasi situasi, objek pembicaraan, waktu, kondisi penerapan, atau perbedaan cara periwayatan. Ulama mengembangkan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, antara lain melalui *al-jam'u wa al-taufiq* (mengompromikan riwayat), *tarjih* (menguatkan salah satu riwayat berdasarkan indikator tertentu), *nasakh* apabila terpenuhi persyaratannya, dan *tawaqquf* ketika belum ditemukan dasar yang memadai untuk menentukan pilihan. Proses ini memperlihatkan bahwa interpretasi hadis merupakan aktivitas sistematis yang menuntut pembacaan lintas riwayat, bukan sekadar penjelasan terhadap satu teks secara terisolasi.

Kecenderungan AI menjawab pertanyaan berdasarkan hadis yang secara langsung dikutip pengguna dapat menimbulkan penyederhanaan terhadap persoalan tersebut. Ketika diminta menjelaskan suatu hadis, sistem mungkin menyajikan satu riwayat beserta makna literalnya tanpa mengidentifikasi hadis lain yang relevan atau tampak berbeda. Padahal, pemahaman yang hanya bertumpu pada satu riwayat dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak seimbang. Sebagai contoh, hadis-hadis mengenai hubungan antara ikhtiar dan takdir, larangan dan kebolehan dalam kondisi tertentu, atau ketentuan ibadah dalam situasi yang berbeda membutuhkan pembacaan komparatif. Apabila AI tidak mengidentifikasi keseluruhan riwayat yang relevan, penjelasan yang dihasilkan dapat menampilkan seolah-olah terdapat pertentangan yang tidak dapat diselesaikan, atau justru menghilangkan perbedaan yang sebenarnya memiliki konsekuensi interpretatif.

Dalam perspektif metodologi hadis, persoalan *mukhtalif al-hadits* juga memperlihatkan bahwa makna sebuah riwayat tidak selalu dapat ditentukan secara mandiri. Makna harus diuji melalui hubungannya dengan riwayat lain, Al-Qur'an, prinsip-prinsip syariat, dan penjelasan ulama. Dengan kata lain, hadis memiliki jaringan makna yang bersifat intertekstual. AI berpotensi

membantu memetakan hubungan tersebut melalui pencarian semantik dan pengelompokan tema. Namun, pengelompokan berdasarkan kemiripan kata atau tema belum tentu mampu membedakan hadis yang benar-benar memiliki hubungan substantif dengan hadis yang hanya memiliki kesamaan kosakata. Di sinilah pentingnya membedakan antara kemampuan mengidentifikasi hubungan tekstual dan kemampuan menetapkan hubungan interpretatif.

Problem keempat berhubungan dengan keragaman penjelasan ulama dalam literatur syarah hadis. Tradisi syarah menunjukkan bahwa pemahaman hadis berkembang melalui dialog intelektual yang panjang. Para ulama tidak hanya menjelaskan arti kata, tetapi juga menguraikan latar periwayatan, menghubungkan satu hadis dengan hadis lain, menjelaskan konsekuensi hukum, dan mempertimbangkan perbedaan mazhab serta pendekatan metodologis. Karya-karya seperti *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, *Syarh Shahih Muslim* karya al-Nawawi, dan *'Umdat al-Qari* karya Badruddin al-'Ayni memperlihatkan kekayaan tradisi interpretasi yang tidak selalu menghasilkan kesimpulan seragam. Perbedaan tersebut bukan semata-mata akibat ketidaksepakatan personal, melainkan dapat berakar pada perbedaan metode memahami teks, penilaian terhadap riwayat, penggunaan dalil pendukung, dan konstruksi argumentasi hukum.

Ketika AI merangkum berbagai penjelasan tersebut, terdapat risiko hilangnya struktur perbedaan pendapat. Sistem dapat menyatukan pandangan beberapa ulama menjadi satu kesimpulan umum tanpa menjelaskan siapa yang mengemukakan pendapat tertentu, apa dasar argumentasinya, dan dalam kerangka metodologis apa pendapat tersebut dibangun. Risiko lain adalah pemilihan satu pendapat sebagai jawaban tunggal, sementara pandangan lain yang relevan tidak ditampilkan. Persoalan ini menjadi penting karena ringkasan yang terlalu sederhana dapat menciptakan kesan bahwa suatu persoalan hadis telah memiliki kesepakatan ulama, padahal terdapat perbedaan pendapat yang diakui dalam tradisi keilmuan. Oleh sebab itu, kualitas interpretasi AI tidak cukup diukur berdasarkan kejelasan dan keringkasan jawaban, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mempertahankan atribusi sumber, konteks argumentasi, dan keragaman pandangan ilmiah.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara *summarization* dan *scholarly interpretation*. Peringkasan merupakan proses menyederhanakan informasi dengan mempertahankan gagasan pokok, sedangkan interpretasi ilmiah menuntut penjelasan mengenai alasan, dasar metodologis, dan hubungan suatu pendapat dengan pendapat lainnya. AI mungkin mampu menghasilkan ringkasan yang mudah dipahami, tetapi ringkasan tersebut dapat kehilangan unsur argumentatif yang justru menjadi inti perbedaan pandangan ulama. Apabila informasi yang kompleks dipadatkan tanpa memperhatikan struktur epistemiknya, hasilnya bukan hanya penyederhanaan bahasa, melainkan juga penyederhanaan pengetahuan. Dengan demikian, tantangan utama bukan melarang AI melakukan peringkasan, tetapi memastikan bahwa proses peringkasan tidak menghapus informasi yang menentukan validitas suatu interpretasi.

Dari perspektif epistemologi, persoalan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara koherensi linguistik dan validitas interpretatif. Koherensi linguistik berhubungan dengan kemampuan menghasilkan uraian yang tersusun secara logis dan mudah dipahami. Sementara itu, validitas interpretatif menuntut kesesuaian penjelasan dengan teks sumber, konteks historis, keseluruhan riwayat, dan argumentasi keilmuan yang dapat diuji. Sebuah jawaban dapat memiliki koherensi linguistik tinggi, tetapi tetap mengandung kesalahan dalam menentukan makna hadis. AI dapat menyusun penjelasan yang terdengar akademis, menggunakan istilah *asbab wurud*, *mukhtalif al-hadits*, dan *tarjih*, tetapi penggunaan istilah tersebut belum membuktikan bahwa metode yang mendasarinya telah diterapkan secara benar. Oleh karena itu, penilaian terhadap interpretasi AI harus bergerak dari sekadar menilai bentuk jawaban menuju pemeriksaan proses argumentasi dan sumber pengetahuannya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa problem interpretasi hadis oleh AI setidaknya memiliki empat dimensi. Pertama, reduksi linguistik, yaitu kecenderungan memahami hadis melalui padanan kata tanpa analisis kebahasaan yang memadai. Kedua, pelepasan historis, yakni penjelasan yang tidak mempertimbangkan *asbab wurud al-hadits* dan kondisi kemunculan riwayat. Ketiga, fragmentasi intertekstual, yaitu pemahaman hadis secara terpisah tanpa menghubungkannya dengan riwayat lain melalui metodologi *mukhtalif al-hadits*. Keempat, homogenisasi otoritas, yaitu penyederhanaan perbedaan penjelasan ulama menjadi satu kesimpulan yang mengaburkan keragaman argumentasi. Keempat dimensi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan AI tidak hanya menyangkut ketepatan bahasa, tetapi juga menyangkut struktur pengetahuan yang menopang interpretasi hadis.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penggunaan AI dalam interpretasi hadis perlu ditempatkan dalam model pembacaan berlapis. Lapisan pertama adalah analisis tekstual, yang meliputi pemeriksaan redaksi Arab, struktur kebahasaan, dan variasi terjemahan. Lapisan kedua adalah analisis historis, dengan menelusuri *asbab wurud al-hadits* serta informasi yang berkaitan dengan situasi kemunculan riwayat. Lapisan ketiga adalah analisis intertekstual, yaitu menghubungkan hadis dengan jalur periwayatan dan riwayat lain yang relevan. Lapisan keempat adalah analisis syarah dan perbedaan pendapat, yang mengharuskan sistem menampilkan pandangan ulama beserta sumber dan argumentasinya. Lapisan kelima adalah verifikasi keilmuan oleh peneliti atau ahli hadis untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak bertentangan dengan bukti dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Model ini menempatkan AI sebagai instrumen yang membantu proses eksplorasi dan pengorganisasian pengetahuan, bukan sebagai pihak yang secara mandiri menentukan makna final hadis (Glynn, 2025).

Dengan demikian, penggunaan kecerdasan buatan dalam interpretasi hadis menuntut sikap kritis yang tidak terjebak pada dua pandangan ekstrem, yaitu penerimaan teknologi secara mutlak atau penolakannya secara total. AI memiliki potensi untuk memperluas akses terhadap khazanah hadis, mempercepat pencarian literatur, membantu penerjemahan, dan mempermudah pemetaan perbedaan pandangan. Akan tetapi, potensi tersebut harus disertai kesadaran bahwa hadis merupakan bagian dari tradisi pengetahuan yang memiliki perangkat metodologis, kesinambungan intelektual, dan tanggung jawab interpretatif. Prinsip yang perlu ditegaskan adalah bahwa kemudahan memahami teks tidak boleh menggantikan kedalaman memahami konteks. Oleh karena itu, AI dapat membantu menjelaskan hadis, tetapi legitimasi penjelasannya tetap harus diuji melalui perangkat ilmu hadis dan pertanggungjawaban keilmuan manusia.

Rekonstruksi Otoritas Keilmuan Hadis di Era AI: Menuju Model Kolaborasi antara Teknologi dan Ulama

Selama berabad-abad, otoritas keilmuan hadis dibangun melalui penguasaan terhadap sumber-sumber primer, penguasaan metodologi kritik sanad dan matan, kesinambungan tradisi pembelajaran, serta pengakuan komunitas ilmiah terhadap kompetensi seorang ahli hadis. Dalam struktur tersebut, otoritas tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menyampaikan informasi, melainkan oleh kapasitas seseorang untuk menjelaskan dasar pengetahuan, mempertanggungjawabkan argumentasi, dan menempatkan suatu riwayat dalam kerangka metodologi yang dapat diuji. Namun, kehadiran AI generatif mulai mengubah pola hubungan antara masyarakat, informasi hadis, dan figur yang selama ini menjadi rujukan keagamaan. Masyarakat kini dapat memperoleh jawaban mengenai kualitas dan makna hadis tanpa harus terlebih dahulu mengakses kitab primer atau berkonsultasi dengan ahli hadis. Perubahan ini menunjukkan bahwa otoritas pengetahuan tidak lagi hanya beroperasi melalui institusi keilmuan

dan figur ulama, tetapi juga melalui sistem digital yang memiliki kemampuan memproduksi penjelasan secara cepat dan interaktif.(Muzakki et al., 2025)

Pergeseran tersebut tidak dapat dipahami sebagai hilangnya otoritas ulama secara langsung, melainkan sebagai perubahan mekanisme masyarakat dalam mengenali dan mengakses otoritas keagamaan. Dalam lingkungan digital, kecepatan respons, kemudahan akses, kemampuan menjawab berbagai pertanyaan, dan penyajian informasi yang sistematis dapat membentuk persepsi bahwa suatu sistem memiliki kompetensi keilmuan. AI bahkan dapat menghasilkan penjelasan dengan menggunakan istilah teknis seperti *sanad*, *matan*, *sahih*, *hasan*, *dhaif*, *jarh wa al-ta'dil*, dan *asbab wurud al-hadits*. Penggunaan terminologi tersebut menciptakan kesan bahwa sistem memahami disiplin ilmu hadis secara mendalam. Padahal, kemampuan menghasilkan bahasa yang menyerupai penjelasan seorang ahli tidak identik dengan kepemilikan kompetensi epistemik seorang ahli hadis. Di sinilah muncul persoalan antara representasi pengetahuan dan otoritas pengetahuan: AI dapat merepresentasikan informasi keilmuan, tetapi representasi tersebut belum tentu disertai kemampuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kebenarannya.

Untuk memahami perubahan tersebut, perlu dibedakan antara otoritas informasional dan otoritas epistemik. Otoritas informasional merujuk pada kemampuan menyediakan, mengorganisasi, mengolah, dan menyajikan informasi secara cepat serta mudah diakses. Dalam aspek ini, AI memiliki keunggulan karena mampu memproses data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, menyusun ringkasan, dan memberikan respons berdasarkan instruksi pengguna. Sementara itu, otoritas epistemik merujuk pada legitimasi untuk menyatakan bahwa suatu pengetahuan dapat diterima berdasarkan kompetensi, metode, bukti, dan pertanggungjawaban ilmiah. Dalam studi hadis, otoritas epistemik mensyaratkan penguasaan terhadap literatur primer, kemampuan melakukan takhrij, penilaian terhadap perawi, kritik sanad dan matan, pemahaman terhadap konteks periwayatan, serta penguasaan terhadap perbedaan pendapat ulama. Dengan demikian, kemampuan AI dalam menyediakan informasi hadis tidak secara otomatis memberikan legitimasi kepadanya untuk menetapkan kualitas dan makna hadis.

Pembedaan tersebut penting karena masyarakat digital sering kali menilai keandalan informasi berdasarkan kualitas tampilan dan kelancaran penjelasan. Jawaban yang panjang, sistematis, dan disertai istilah akademik dapat dianggap benar meskipun sumbernya tidak jelas atau argumentasinya tidak dapat diverifikasi. Kondisi ini menghadirkan risiko terbentuknya otoritas semu (*simulated authority*), yaitu keadaan ketika suatu sistem memperoleh kepercayaan karena kemampuannya menampilkan karakteristik komunikasi seorang ahli, bukan karena telah memenuhi standar pembuktian keilmuan. Dalam konteks hadis, otoritas semu dapat muncul ketika pengguna menerima penilaian kualitas hadis dari AI tanpa memeriksa sumber primer, mengikuti penjelasan fikih yang tidak disertai perbandingan riwayat, atau menyebarkan kutipan hadis berdasarkan jawaban yang belum diverifikasi. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kesalahan informasi, tetapi juga menyangkut perubahan standar masyarakat dalam menentukan siapa atau apa yang layak dipercaya sebagai sumber pengetahuan keagamaan.

Risiko berikutnya adalah ketergantungan epistemik masyarakat terhadap teknologi. Kemudahan memperoleh jawaban dalam waktu singkat dapat mendorong pengguna untuk mengalihkan proses pencarian dan penilaian pengetahuan kepada sistem AI. Jika berlangsung tanpa literasi kritis, pola tersebut berpotensi mengurangi kebiasaan membaca sumber primer, membandingkan pendapat ulama, dan memeriksa dasar argumentasi suatu penjelasan. Masyarakat tidak lagi sekadar menggunakan AI untuk membantu memperoleh informasi, tetapi dapat menjadikannya sebagai penentu akhir atas persoalan keagamaan. Ketergantungan

semacam ini perlu dibedakan dari pemanfaatan teknologi secara produktif. Penggunaan AI sebagai instrumen pencarian dan pembelajaran dapat meningkatkan akses pengetahuan, sedangkan penyerahan keputusan ilmiah sepenuhnya kepada AI berpotensi melemahkan kapasitas kritis pengguna. Oleh karena itu, persoalan yang harus diatasi bukan sekadar kesalahan sistem, melainkan juga perubahan perilaku epistemik masyarakat dalam menerima, menguji, dan menyebarkan pengetahuan hadis (Kulal, 2025).

Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, pergeseran tersebut dapat dibaca sebagai perubahan arena produksi dan distribusi otoritas keagamaan. Otoritas yang sebelumnya banyak dibentuk melalui lembaga pendidikan, jaringan keilmuan, pesantren, perguruan tinggi, dan tradisi pembelajaran langsung kini berinteraksi dengan platform digital dan sistem AI. Perubahan ini tidak serta-merta menghapus peran institusi keilmuan, tetapi mengubah cara masyarakat mengakses dan menilai informasi yang berasal dari institusi tersebut. Bahkan, jawaban AI dapat memengaruhi persepsi pengguna terhadap suatu pendapat ulama karena sistem mampu menyajikan pandangan tertentu tanpa selalu menjelaskan latar belakang metodologisnya. Dalam situasi ini, ulama dan lembaga keilmuan hadis menghadapi tantangan untuk tidak hanya mempertahankan otoritas melalui penguasaan literatur, tetapi juga mengembangkan kemampuan literasi digital, keterbukaan sumber, dan komunikasi keilmuan yang sesuai dengan perubahan lingkungan informasi.

Meskipun demikian, rekonstruksi otoritas hadis tidak seharusnya diarahkan pada pertentangan antara teknologi dan ulama. Menempatkan AI sebagai ancaman yang harus ditolak sepenuhnya akan mengabaikan potensi teknologi dalam memperluas akses terhadap literatur hadis, membantu pencarian sumber, mengorganisasi data perawi, dan mempermudah proses pembelajaran. Sebaliknya, menerima AI sebagai otoritas yang dapat menggantikan ahli hadis juga mengandung persoalan epistemologis karena mengabaikan karakter historis dan metodologis ilmu hadis. Posisi yang lebih proporsional adalah membangun hubungan kolaboratif dengan pembagian fungsi yang jelas. Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan informasi, sedangkan ulama dan peneliti hadis tetap bertanggung jawab atas pemeriksaan bukti, penilaian metodologis, dan penetapan kesimpulan ilmiah. Dengan pendekatan ini, inovasi teknologi tidak dipertentangkan dengan tradisi keilmuan, tetapi diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan aksesibilitas studi hadis.(Kostikova et al., 2023)

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menawarkan model Kolaborasi Epistemik AI dan Ulama Hadis (*Collaborative Hadith Epistemic Authority*). Model ini dibangun atas empat prinsip yang saling berhubungan. Pertama, keterlacakan sumber (*source traceability*), yaitu setiap informasi hadis yang dihasilkan AI harus disertai rujukan yang dapat diperiksa pada sumber primer, termasuk identitas kitab, lokasi riwayat, dan variasi redaksinya. Prinsip ini bertujuan mencegah penerimaan informasi yang tidak memiliki dasar bibliografis yang jelas. Kedua, verifikasi metodologis (*methodological verification*), yaitu seluruh hasil penelusuran dan klasifikasi AI harus diuji berdasarkan kaidah takhrij, kritik sanad dan matan, serta perangkat ilmu rijal al-hadits. AI dapat membantu menyusun dan membandingkan data, tetapi keputusan mengenai kualitas riwayat harus didasarkan pada pemeriksaan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, interpretasi kontekstual (*contextual interpretation*), yaitu penjelasan hadis harus mempertimbangkan aspek kebahasaan, asbab wurud al-hadits, hubungan antarriwayat, serta keragaman pandangan ulama dalam kitab-kitab syarah. Prinsip ini mencegah pemahaman hadis yang hanya bertumpu pada terjemahan literal atau satu riwayat secara terpisah. Keempat, akuntabilitas keilmuan (*scholarly accountability*), yaitu kesimpulan yang menyangkut validitas dan interpretasi hadis harus memiliki penanggung jawab keilmuan yang jelas. Dalam kerangka

ini, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban akademik dan moral sebagaimana seorang peneliti atau ahli hadis. Karena itu, penggunaan AI harus disertai keterbukaan mengenai sumber, keterbatasan sistem, proses verifikasi, dan pihak yang bertanggung jawab atas kesimpulan akhir.

Keempat prinsip tersebut membentuk hubungan kerja yang berurutan, bukan sekadar daftar nilai normatif. Keterlacakan sumber menjadi fondasi bagi verifikasi metodologis karena suatu riwayat tidak dapat diperiksa secara ilmiah apabila sumbernya tidak diketahui. Verifikasi metodologis menjadi dasar bagi interpretasi kontekstual karena pemaknaan harus bertumpu pada riwayat yang telah diperiksa. Selanjutnya, akuntabilitas keilmuan memastikan bahwa keseluruhan proses memiliki pihak yang bertanggung jawab atas ketepatan kesimpulan. Dengan demikian, model ini menempatkan AI dalam proses pengolahan dan penyediaan informasi, sedangkan ahli hadis menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban ilmiah. Hubungan tersebut sekaligus membuka ruang bagi kolaborasi antara ahli hadis, ahli teknologi informasi, pustakawan digital, dan lembaga pendidikan Islam dalam membangun ekosistem pengetahuan hadis yang dapat dipercaya.

Dalam penerapannya, model kolaboratif ini dapat dikembangkan melalui lima tahapan operasional. Tahap pertama adalah pencarian dan identifikasi riwayat, ketika AI membantu pengguna menemukan redaksi hadis, kemungkinan sumber kitab, serta variasi teks. Tahap kedua adalah pengorganisasian data, yaitu sistem menyusun informasi mengenai jalur periwayatan, nama perawi, dan literatur pendukung. Tahap ketiga adalah pemeriksaan keilmuan, ketika ahli hadis menilai kesinambungan sanad, kredibilitas perawi, kualitas matan, dan kemungkinan adanya cacat tersembunyi. Tahap keempat adalah interpretasi komprehensif, yaitu menghubungkan hadis dengan konteks historis, riwayat lain, serta penjelasan para ulama. Tahap kelima adalah publikasi hasil yang telah diverifikasi dengan mencantumkan sumber dan batasan interpretasi. Melalui tahapan tersebut, AI tidak diposisikan sebagai pengganti proses ilmiah, melainkan sebagai perangkat yang membantu mempercepat pekerjaan tanpa menghilangkan kewajiban verifikasi.

Model ini juga mengandung implikasi bagi pengembangan pendidikan ilmu hadis. Kurikulum studi hadis perlu mengintegrasikan literasi AI dengan penguatan metodologi klasik. Mahasiswa tidak cukup hanya diajarkan menggunakan aplikasi pencarian hadis, tetapi juga harus mampu menguji jawaban yang dihasilkan, menemukan kesalahan atribusi, memeriksa sumber primer, dan membedakan penjelasan sistem dari pendapat ulama. Penguasaan teknologi tanpa metodologi berisiko menghasilkan ketergantungan, sedangkan penguasaan metodologi tanpa literasi digital dapat membatasi kemampuan peneliti dalam menghadapi perkembangan sumber informasi kontemporer. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi kebutuhan akademik agar generasi peneliti hadis mampu memanfaatkan teknologi secara kritis tanpa kehilangan fondasi disiplin keilmuannya.Nawir, Muammar, and Laiya, "Otoritas Hadis Di Era Kecerdasan Buatan: Telaah Filosofis Atas Peran Chatgpt Dalam Produksi Pengetahuan Keislaman."

Pada akhirnya, rekonstruksi otoritas hadis di era kecerdasan buatan tidak berarti memindahkan otoritas ulama kepada teknologi, tetapi menata kembali hubungan antara sumber pengetahuan, perangkat pengolahan informasi, dan pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran ilmiah. AI memiliki kapasitas untuk memperluas akses, mempercepat pencarian, dan membantu pengorganisasian data, tetapi legitimasi epistemik tetap mensyaratkan pembuktian, metodologi, dan pertanggungjawaban. Karena itu, masa depan studi hadis tidak harus dibangun melalui pilihan antara mempertahankan tradisi atau menerima teknologi. Yang diperlukan adalah kolaborasi kritis yang menjadikan teknologi sebagai instrumen penguatan tradisi keilmuan. Prinsip dasarnya adalah bahwa kecepatan teknologi harus dikendalikan oleh ketelitian

metodologi, kemudahan akses harus disertai keterlacakan sumber, dan setiap kesimpulan keagamaan harus tetap berada dalam tanggung jawab keilmuan manusia.

SIMPULAN

Transformasi digital melalui kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan terhadap cara hadis ditelusuri, dipahami, dan disebarluaskan dalam ruang keagamaan. Kemampuan AI dalam melakukan pencarian teks, identifikasi sumber, penerjemahan, pengelompokan tema, serta penyajian penjelasan memberikan kemudahan baru bagi pengembangan kajian hadis. Namun, kemudahan tersebut tidak serta-merta menjamin ketepatan informasi maupun legitimasi kesimpulan keilmuan yang dihasilkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar penggunaan AI dalam studi hadis terletak pada perbedaan antara kemampuan mengolah informasi dan kewenangan menetapkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Pada aspek validasi, AI dapat membantu proses takhrij dan penelusuran riwayat, tetapi identifikasi teks dan sumber tidak identik dengan penilaian kualitas hadis. Penetapan derajat hadis tetap mensyaratkan pemeriksaan kesinambungan sanad, kredibilitas dan ketelitian perawi, serta terbebasnya riwayat dari syudzudz dan 'illah. Pada aspek interpretasi, kemampuan AI menerjemahkan dan merangkum teks belum menjamin pemahaman yang utuh terhadap struktur bahasa Arab, asbab wurud al-hadits, hubungan ant riwayat, maupun perbedaan penjelasan para ulama. Dengan demikian, kelancaran bahasa dan koherensi jawaban algoritmik tidak dapat dijadikan ukuran tunggal kebenaran interpretasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan AI tidak harus dipertentangkan dengan otoritas ulama hadis, melainkan perlu ditempatkan dalam hubungan kolaboratif yang proporsional. Model kolaborasi epistemik AI dan ulama hadis dibangun melalui empat prinsip: keterlacakan sumber (*source traceability*), verifikasi metodologis (*methodological verification*), interpretasi kontekstual (*contextual interpretation*), dan pertanggungjawaban keilmuan (*scholarly accountability*). Melalui model ini, AI berfungsi sebagai instrumen pendukung, sedangkan ulama dan peneliti tetap memegang tanggung jawab dalam menguji bukti, menilai argumentasi, dan menetapkan kesimpulan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penegasan bahwa otoritas keilmuan hadis tidak ditentukan oleh kecepatan akses maupun kecanggihan teknologi, tetapi oleh kompetensi, ketepatan metode, kedalaman pemahaman, dan tanggung jawab ilmiah. Oleh karena itu, integrasi AI dalam studi hadis harus disertai literasi digital kritis dan penguatan metodologi ilmu hadis. Penelitian selanjutnya perlu menguji model ini melalui perbandingan keluaran beberapa platform AI terhadap riwayat hadis tertentu dengan melibatkan pakar hadis sebagai penilai. Dengan demikian, inovasi teknologi dapat memperluas akses terhadap khazanah hadis tanpa mengurangi integritas tradisi kritik dan otoritas keilmuan Islam.

REFERENSI

Afandi, A. R., & Kurnia, H. (2023). Revolusi teknologi: Masa depan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya terhadap masyarakat. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal, 3*(1), 9–13. https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1837

Agustina, A., & Suharya, Y. (2024). Penerapan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) dalam bidang pendidikan menuju generasi Indonesia emas 2045. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru XVI, 16*, 129–138.

Amalia, Y. (2024). Analisis akurasi ChatGPT dalam mengkaji validitas sanad dan matan hadis. *Journal of Hadith Studies, 7*(2), 140–158. https://doi.org/10.32506/johs.v7i2-03

Ghifari, M. (2025). Validitas data hadis dalam praktik takhrij hadis menggunakan ChatGPT. *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith Studies, 1*(1), 53–61. https://doi.org/10.51875/islamictexts.v1i1.841

Hidayah, I., & Musaddad, E. (2025). Digitalisasi hadits: Perkembangan dan tantangan di era modern. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis, 2*(2), 184–204. https://doi.org/10.63424/amsal.v2i2.361

Mala, F. (2015). *Otoritas hadis-hadis 'bermasalah' dalam Shahih al-Bukhari*. Elex Media Komputindo.

Muhammad Taufiqul Hidayat, Fauza, Z. L., Palangkey, R. D., & Miro, A. B. (2025). Takhrij hadits: Metodologi kritik sanad dan matan untuk memverifikasi keshahihan hadits. *Ulil Albab, 4*(11).

Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, 2*(3), 793–800.

Rustiyana, R., Al-Jabri, S., & Johnson, M. (2025). AI-powered hadith verification: Toward a new model of authenticity in Islamic knowledge transmission. *International Journal of Noesantara Islamic Studies, 2*(5), 256–269. https://doi.org/10.70177/ijonis.v2i5.2836

Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 10*(4), 233–243. https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181

Zaenudin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi. *Jurnal Informatika Utama, 2*(2), 128–153. https://doi.org/10.55903/jitu.v2i2.240

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*.